

**ANALISIS HAMBATAN-HAMBATAN INKLUSI KEUANGAN MELALUI
FINTECH SYSTEM TERHADAP UMKM DI KOTA MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar*

Oleh
ERWIN SAPUTRA
903001151147

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

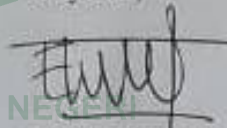
Nama : Erwin Sputra
NIM : 90300115147
Tempat/Tgl. Lahir : Sabbala, 5 Agustus 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Sabbala, Kel. Bontoramba, Kac.Bontonompo Selatan ,
Kab.Gowa
Judul : Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Melalui
fintech System Terhadap UMKM Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan batal demi hukum.

Gowa,

2019

Penyusun,



Erwin Saputra

NIM. 90300115147

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM Di Kota Makassar*", yang disusun oleh **ERWIN SAPUTRA, NIM 90300115147**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019 bertepatan dengan 16 Rabi'ul-Awal 1441 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 13 November 2019
16 Rabi'ul-Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyudin Abdullah, S.E., M.Si., Ak	(.....)
Penguji I	: Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Andi Faisal Anwar, S.E., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt, karena rahmat, keinginan dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa penyusun curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad swa yang telah membawa umatnya dari alam yang berliku-liku menuju jalan yang lurus yang aman dan sejahtera minadzulumati ilannur. Dengan izin dan kehendak Allah swt skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini berjudul “***Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM Di Kota Makassar***” telah diselesaikan dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu: Ayahanda **Alm. Machmud Daeng Ngitung** dan Ibunda **Muliati Daeng Tanning** yang paling berjasa atas apa yang sampai saat ini saya capai, telah mendidik saya, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan saya sampai pada tingkat ini dan terus memberikan doanya. Karena itu, pada kesempatan ini penyusun

ingin menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor serta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Hasbiullah SE., M.Si dan Dr. Alim Syahriati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas segala bantuan, kontribusi dan bimbingannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Andi Faisal Anwar, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penguji skripsi Bapak Dr. Sijadjuddin, SE., M.Si dan Ibu Sitti Aisyah, S.Ag, M.Ag. yang telah mengajarkan kepada penyusun arti sebuah kesabaran, dan pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja.
6. Penguji Komprehensif yang telah mengajarkan saya arti kesabaran dan teladan, serta pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja Dr. Siradjuddin, SE., M.Si., Dr. Amiruddin K, M.EI dan Akramunnas, SE., M.Si.

7. Seluruh staf bagian Akademik, tata usaha, jurusan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyusun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan akademik dan administrasi.
8. Seluruh tenaga pengajar dan pendidik khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas kepada penyusun selama proses perkuliahan, dan praktikum.
9. Untuk saudaraku tercinta Kakak Nuraida, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
10. Teman-teman seangkatan 2015, terkhusus untuk jurusan Ilmu Ekonomi semoga tetap menjadi keluarga yang solid meskipun nantinya kita berpisah untuk mencapai kesuksesan masing-masing.
11. Terima kasih untuk Kasim, Irvan, Rusty, Alam, Riyan, Abbas, Iffar, Hendra, Rahim, dan Ardi yang telah memberikan dukungan dan motivasi, terima kasih atas persahabatan yang luar biasa ini.
12. Terimah kasih buat Sulfiani, S.IP atas dukungan, motivasi serta doanya dalam Menyelesaikan penulisan Skripsi.
13. Terimah kasih buat teman-teman komunitas Rumah Baca Aksara Panrannuanta atas bantuan, dukungan dan motivasinya.
14. Terima Kasih untuk semangat dan dukungannya teman-teman dari DKR (Dewan Kerja Ranting) Bontonompo Selatan.
15. Kepada sahabat-sahabat Ekonomi Intelegen terimah kasih atas semangat dan dukungannya serta doanya dalam menyelesaikan Skripsi Penulisan.

16. Terima kasih juga buat Kak Rajab yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi, menemani saya berjuang dan menyemangati saya hingga skripsi ini selesai dan hingga saya sampai pada tujuan saya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penyusun tak lupa mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Amin.

Gowa, 2019
Penulis,

Erwin Saputra
NIM: 90300115147



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian	4
D. Kajian dan Penelitian Terdahulu	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	6
A. Inklusi Keuangan	6
B. Keuangan Dalam Prespektif Islam ..	19
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)..	21
D. Kerangka Pikir Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan data	32
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengelolahan dan Analisi Data	35
G. Pengujian keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Deskripsi Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64

B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	28
---	----



ABSTRAK

N a m a : ERWIN SAPUTRA
N I M : 90300115147
Judul Skripsi : Analisis Hambatan-hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM Di Kota Makassar

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh, bahwa apa saja yang menjadi hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system yang ada di Kota Makassar. Dan Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada akademisi, dosen, mahasiswa maupun pemerintah mengenai hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system terhadap UMKM di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *kuantitatif* dimana Penelitian ini merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, konsep, pengertian, karakteristik, simbol, gejala, maupun deskripsi tentang fenomena yang dilaksanakan di lingkup wilayah Kota Makassar. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data skunder yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data dari berbagai badan instansi tertentu berupa dokumen dan arsip.

Maka adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan dari narasumber masih awam akan proses peminjaman seperti itu, ada beberapa hambatan yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha UMKM tidak memakai atau menggunakan mode peminjaman tersebut selain karna mereka takut untuk berurusan dengan peminjaman seperti itu, mereka juga merasa belum mengetahui secara detail akan procedural dan tata cara dalam menggunakan jasa peminjaman berbasis hp android dan teknologi. Hal ini disebabkan karna beberapa hambatan diantaranya para pelaku usaha belum mendapat informasi yang jelas baik melalui media maupun sosialisasi secara massif dan langsung oleh pihak penyedia jasa peminjaman tersebut sehingga para pelaku usaha masih ragu untuk memakai jasa peminjaman berbasis teknologi, belum lagi banyak berita miring yang beredar dikalangan para pelaku usaha akan ketidak amanan yaitu pihak dari penyedia jasa peminjaman berbasis teknologi tidak mampu menjamin privasi dari para pelanggan jika meminjam uang melalui aplikasi berbasis teknologi, banyak yang beranggapan sering terjadi tindak penipuan apabila memakai jasa peminjaman berbasis teknologi yang tergolong instant tersebut hal ini yang kemudian semakin menambah keraguan para pelaku usaha.

Kata Kunci : Hambatan-hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki tahun 2017, perekonomian Kota Makassar kian memburuk. Hal itu ditandai dengan posisi tingkat ketimpangan pendapatan daerah ini, yang menempati ranking empat tertinggi dengan tingkat pendapatan yang cukup timpang, dari 24 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Hal itu juga diperparah dengan tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Hal itu kemudian tercermin pada nilai gini ratio daerah ini, yang telah mencapai angka 0,396, menandakan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin semakin timpang. Selain itu, angka penduduk miskin Kota Makassar pada tahun 2017, bahkan telah mencapai 68 ribu orang. Artinya, performa perekonomian ini kurang membaik dalam beberapa tahun terakhir, dalam hal meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Padahal, dilihat dari angka statistik yang ada justru menunjukkan perekonomian Kota Makassar bertumbuh paling impresif di Sulawesi Selatan. Hal itu dijustifikasi dengan munculnya paparan Badan Pusat Statistik Kota Makassar yang ikut mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi kota ini mampu mencapai 7,99 persen ditahun 2017, bahkan dapat mengungguli capaian Sulsel yang hanya mampu bertengger pada angka 7,78 persen. Jika dikomparasi pada level yang lebih luas,

bahkan mampu melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di angka 5, 19 persen. Jika ditelusur lebih jauh, maka pada prinsipnya peran Kota Makassar terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi Sulsel merupakan yang tertinggi diantara 24 kabupaten kota lainnya di Sulsel, yakni mampu berkontribusi sebesar 34, 17 persen.

Melihat kontradiksi faktual ini, ikut membenarkan bahwa dibalik capaian-capaian positif ekonomi Kota Makassar, justru disaat yang sama kota ini berada dibawah bayang-bayang kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Kontradiksi diatas ikut membenarkan bahwa praktik pembangunan perekonomian Kota Makassar, selama ini berjalan ilusif dan kurang mengakomodir kepentingan kelas bawah. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah kesempatan para pelaku usaha mikro kecil (UMKM) untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan yang semakin terbatas. Persoalan aksesibilitas keuangan, menjadi persoalan mendasar para masyarakat rentan ini. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat. Pasalnya, ditengah kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu, para penduduk miskin ini, cukup susah untuk beranjak dari situasi itu karena akses keuangan yang didapatkan sangat rendah, untuk mengerjakan usaha kecil yang secara keseharian mereka jalani.

Misi penguatan inklusi keuangan dalam kondisi terakhir, diperkuat oleh fintech system. Kehadiran financial technology (fintech) didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia secara umum, termasuk Kota Makassar.

Mengingat, kebanyakan pelaku fintech bertujuan menjangkau masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang belum layak mendapat pembiayaan dari bank (unbankable). Saat ini masih banyak UMKM yang tidak dapat mengakses bantuan keuangan microfinance untuk mengembangkan usaha pada skala yang lebih besar. Di Indonesia, fintech kebanyakan masih berbisnis payment seperti sistem pembayaran seperti e-money, wallet, dan sebagainya. Sementara jumlah fintech yang menyalurkan kredit persinya masih di bawah pembayaran.

Memperhatikan uraian diatas, maka judul penelitian yang dikemukakan disini adalah: “**Analisis Hambatan-hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System Terhadap UMKM Di Kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok pembahasan yang akan di bahas adalah:

Faktor apa saja yang menjadi hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system terhadap UMKM di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jauh faktor apa saja yang menjadi hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system di Kota Makassar?
2. Bagaimana keberadaan fintech meningkatkan inklusi keuangan dan mereduksi angka kemiskinan?

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan dalam ilmu ekonomi dan manajemen keuangan.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat kepada akademisi, dosen, mahasiswa maupun pemerintah mengenai hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system dan upaya mereduksi penduduk miskin perkotaan di Kota Makassar.

D. Kajian dan Penelitian Terdahulu

Titiharuw dan Atje (2009) menemukan bahwa kebanyakan dari masyarakat bawah dan pelaku UMKM lebih memilih menggunakan transaksi tunai untuk melakukan aktivitas transaksi mereka. Para pelaku UMKM melakukan hal tersebut

diakibatkan akses keuangan yang masih terbatas untuk mendukung aktivitas penghidupan mereka, sehingga mereka tidak memilih menabung uangnya di bank.

Berbeda dengan temuan Porteus (2006), Ivatury dan Mas (2008), Peake (2012), Gross et.al (2012) menemukan bahwa layanan keuangan digital sangat potensial untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk bagi UMKM maupun masyarakat miskin. Hal tersebut berkembang seiring massifnya penggunaan telepon seluler dikalangan masyarakat. Layanan keuangan digital prinsipnya berperan sebagai penyedia jasa keuangan dan pembayaran yang diserahkan dan dikelola menggunakan teknologi mobile atau web (*branchless bank*).

Namun Hasan, Renzis dan Schmiedel (2012) menyimpulkan bahwa terjadinya pergeseran akses keuangan ke layanan digital akan meningkatkan mobilitas perdagangan, aksesibilitas keuangan, perdagangan, pertumbuhan ekonomi hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Dengan demikian, layanan keuangan digital yang berbasis pada financial technology (fintech system) sangat bermanfaat dalam aktivitas perekonomian diberbagai level.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Inklusi Keuangan

Menurut Mathew (2015) mengungkapkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah, berpendapatan tidak menentu dan tidak pasti, merupakan kelompok yang tidak mampu mengakses layanan keuangan. Padahal akses keuangan akan membantu mereka merencanakan masa depan dan melindungi diri dari hal-hal tak terduga. Pada dasarnya orang miskin tidak dapat menabung, baik dalam bentuk uang tunai, maupun tabungan tersembunyi di bawah kasur atau dalam stoples kaca, meskipun ketika mereka memiliki uang namun mudah untuk dibelanjakan, sebab mereka hidup di bawah tekanan kebutuhan ekonomi yang begitu kompleks. Uang tunai juga sangat rentan terhadap pencurian. Sementara itu, layanan tabungan informal yang tersedia di pasar berkembang sering kali disertai dengan biaya administrasi yang besar.

Hal ini membuat orang miskin rentan, karena pencurian atau kehilangan dapat mendorong orang ke dalam kemiskinan total. Untuk itu inklusi keuangan memegang peranan begitu penting dan meningkatkan literasi keuangan harus menjadi prioritas. Sejumlah tuntutan yang begitu penting menunjukkan bahwa menyediakan kemampuan untuk meminjam secara efisien dan aman meningkatkan kesejahteraan

dan mendorong kesejahteraan, pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui kombinasi kebijakan publik yang efektif, kemitraan publik-swasta dan penerapan teknologi terkini secara penuh, layanan keuangan dapat ditawarkan kepada masyarakat miskin. Di Indonesia, di mana populasi bank hanya 36%, pemerintah telah menjadikan inklusi keuangan sebagai prioritas.

Strategi inklusi keuangan nasional difokuskan pada penyediaan akses kepada orang miskin, serta pekerja migran, wanita dan komunitas terpencil. Inklusi keuangan juga merupakan perhatian utama bagi bank sentral, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Pemerintah OJK berusaha memberikan pendidikan keuangan pada masyarakat, karna hal ini sangat penting. OJK memandang perlu menjadikan literasi keuangan menjadi suatu program strategi bersifat nasional. OJK juga sangat intensif menstimulus masyarakat untuk mengenal dan mengerti produk-produk jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan. Untuk mendorong masyarakat lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangatlah dibutuhkan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan produk/ jasa keuangan. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan melalui produk dan layanannya harus menjadi mitra bagi masyarakat dan dapat menyediakan produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan OJK menambahkan ada dua hal utama yang perlu didorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Itu yang akan menjadikan

industri jasa keuangan menjadi mitra masyarakat. Dalam mewujudkan itu semua, kerjasama yang erat antara otoritas jasa keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan sangatlah dibutuhkan. Dimana literasi keuangan dapat berjalan dengan baik apabila di dukung pula dengan program keuangan inklusif yang mana bila kedua program tersebut dijalankan dapat menghasilkan *usage*/manfaat yang baik. Inklusi keuangan sendiri bermakna sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif yang dapat memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat.

Namun, hal ini berbeda dengan Menurut Vitt et al dan Huston dalam Rika (2016) Literasi keuangan dapat merupakan pemahaman komprehensif serta mendalam tentang pengelolaan keuangan personal atau keluarga yang membuat seseorang mempunyai kuasa, pemahaman dan keyakinan penuh terhadap keputusan keuangan yang diambil. Seperti yang diungkapkan oleh Vitt et al mengatakan pendidikan literasi keuangan sebagai kemampuan membaca, menganalisis, mengelolah, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan yang mempengaruhi kesejahteraan. Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk memilah kebutuhan keuangan, kebutuhan perencanaan keuangan, dengan belajar tentang literasi keuangan, mampu memahami peristiwa perekonomian secara umum, dan ketetapan dalam pengambilan keputusan keuangan sangat menentukan pada kesejahteraan manusia dimasa yang akan datang. Manusia perlu dibekali dengan pendidikan literasi keuangan yang baik dan terencana. Pemahaman tentang literasi keuangan sebagai

proses membangun kemampuan tentang produk-produk serta konsep keuangan melalui informasi, instruksi dan nasihat untuk mengembangkan keahlian serta kepercayaan diri dan kesadaran terhadap risiko keuangan. Mampu mengatasi dengan perlindungan asuransi serta meningkatkan peluang membuat keputusan keuangan yang cerdas. Mengetahui tentang produk-produk keuangan, dan mampu membuat tindakan alternatif untuk meningkat kesejahteraan. Literasi keuangan dapat dikatakan sebagai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang berbagai resiko yang akan terjadi ketika sebuah keputusan keuangan diambil. Sehingga seseorang dengan pengetahuan keuangan yang baik akan dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan secara bijak. Pengetahuan keuangan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi keuangan, namun belum dapat menggambarkan literasi keuangan seseorang. Literasi keuangan memiliki dimensi aplikasi tambahan yang menyiratkan bahwa seseorang harus memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuan finansialnya untuk membuat keputusan. Dalam hal ini pembuatan keputusan yang baik merupakan hal pokok dari literasi keuangan itu. Pendidikan literasi keuangan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah negara.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, Jump Strat Coaliton for personal financial literacy dalam Dwitya (2015) berpendapat bahwa kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan seseorang secara efektif untuk keamanan finansial seumur hidup. Ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan pribadi terdiri dari prinsip-prinsip khusus, metode dan kemampuan yang perlu diakui individu untuk mengelola uang dan asset mereka. Ini

juga hanya didefinisikan sebagai kompotisi untuk mengetahui, memahami, dan mengevaluasi informasi tentang pengetahuan untuk keperluan pribadi.

Menurut Margaretha & Pambudhi dalam Fikqi (2019) mendefinisikan literasi keuangan sebagai sebuah kemampuan pengambilan keputusan dalam pengaturan keuangan bagi individu agar terhindar akan masalah keuangan. Literasi keuangan mempengaruhi hampir semua aspek yang berhubungan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan. Dan Menurut Yushita dalam Fikqi (2019), pengelolaan keuangan harus ada perencanaan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Media pencapaian tujuan tersebut dapat melalui tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka tidak akan terjebak pada perilaku berkeinginan yang tidak terbatas. Dan Yushita membagi literasi keuangan menjadi empat aspek, yang terdiri dari pengetahuan keuangan dasar, simpanan dan pinjaman, proteksi, dan investasi. Hal yang paling mendasar dalam literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan dasar. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Krishna, Rofaida dan Sari dalam Indah (2018) menjelaskan bahwa literasi keuangan membantu individu agar terhindar dari masalah keuangan. Dengan adanya literasi keuangan masyarakat mampu mengalokasikan keuangan mereka

dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari bantuan lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya untuk membantu masyarakat dalam manajemen keuangannya serta memanfaatkan program-program dari lembaga keuangan yang ada, Seperti adanya investasi dan penggunaan kredit. Begitupun bagi para pelaku UMKM yang harus mengetahui literasi keuangan agar manajemen keuangan tersebut terhindar dari risiko keuangan. Dan menurut Hudson dan Bush dalam Indah (2018) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat kedalam perilaku. Literasi keuangan disebut juga sebagai keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang efektif terhadap investasi yang dapat meningkatkan perekonomiannya pada masa yang akan datang.

Menurut Lusuardi & Mitchell dalam Indah (2018) literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut masyarakat harus mengetahui bagaimana cara mencapai kesejahteraan mulai dari perencanaan sampai penggunaan, hal ini mengacu pada kondisi keuangan masyarakat. Dengan berapapun penghasilan masyarakat jika masyarakat mampu mengalokasikan keuangannya pada lembaga yang benar maka tidak akan terjadi risiko keuangan melainkan keuntungan dan kesejahteraanpun akan tercapai. Salah satu risiko keuangan adalah penggunaan dana yang tidak sesuai kebutuhan, hilangnya dana baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari hal tersebut

betapa penting peran lembaga keuangan dalam membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengalokasikannya dananya secara baik guna mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk menghindari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat timbul jika terjadi kesalahan manajemen. Memiliki literasi keuangan adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan kehidupan yang makmur. Dengan manajemen keuangan yang tepat didukung oleh literasi keuangan yang baik, standar kehidupan masyarakat diharapkan meningkat, karena tidak peduli seberapa tinggi tingkat pendapatan seseorang tetapi tanpa manajemen keuangan yang tepat, keamanan finansial akan sulit dicapai. Perlunya pendidikan publik tentang produk keuangan bank dan non-bank sangat mendesak sehingga orang tidak mudah ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya melek finansial dalam semua aspek keuangan pribadi bukan karena kesulitan dalam menggunakan uang yang mereka miliki, tetapi individu diharapkan dapat menikmati hidup mereka dengan menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki secara tepat.

Menurut Chen dan Volpe dalam Sylviana (2018), mendefinisikan bahwa literasi keuangan suatu pengetahuan bagaimana mengelola keuangan agar hidup lebih sejahtera dimasa depan. Berdasarkan PISA 2012: Kerangka Penilaian Literasi Keuangan (OECD INFE, 2012) itu merumuskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor fundamental bagi pertumbuhan stabilitas ekonomi dan keuangan. Dari sudut pandang konsumen, literasi keuangan yang baik mengarah pada keputusan

pengeluaran yang mengutamakan kualitas. Ini akan menghasilkan persaingan industri yang sehat dan persaingan akan mengedepankan inovasi dalam barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, dengan literasi keuangan yang baik juga dapat meminimalkan terjadinya keputusan yang salah pada masalah ekonomi dan keuangan yang muncul. Dari perspektif penyedia layanan keuangan, literasi keuangan yang baik akan memberikan informasi yang memadai tentang produk serta pemahaman risiko. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah, dengan literasi keuangan yang baik di masyarakat, pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak maksimum untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas layanan publik.

Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa rasa tidak nyaman, merencanakan masa depan, dan merespon dengan kompeten terhadap peristiwa kehidupan yang memengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa dalam ekonomi umum. Literasi keuangan terjadi ketika seorang individu memiliki seperangkat keterampilan dan kemampuan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Literasi keuangan membantu meningkatkan kualitas layanan keuangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara. Meningkatkan kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengelola keuangan pribadinya.

Menurut NFER dalam Bedjo Santoso (2017), mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan

membuat keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang. Peran penting literasi keuangan terlihat jelas dalam penelitian lapangan dan analisis terkait, khususnya dalam membantu penggunaan informasi keuangan mikro, dalam mempromosikan keterlibatan dalam sektor keuangan formal, dan dalam menangani masalah-masalah tradisi yang memandu perilaku banyak warga negara sehubungan dengan keuangan.

Menurut Howel, Zahroh dan Pagestuti dalam Sylviana (2018), menyatakan bahwa manajemen keuangan pribadi adalah salah satu kompetensi paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat modern, karena pilihan konsumen sehari-hari akan memengaruhi keamanan finansial dan standar hidup seseorang. Masalah dalam mengelola keuangan pribadi sering dianggap remeh, sehingga orang cenderung belajar tentang keuangan pribadi melalui proses coba-coba. Selain manfaat bagi individu dan masyarakat, literasi keuangan juga diperlukan untuk memajukan industri jasa keuangan karena masyarakat adalah pengguna utama jasa keuangan. Literasi keuangan akan menciptakan efek berantai pada tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan, yang kemudian dapat meningkatkan keuntungan dan mendorong lembaga keuangan untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih bervariasi.

Menurut Bank Indonesia (2017) Financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan

masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Meski masih banyak masyarakat yang tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dan sebagainya yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dan sebagainya. Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai skill yang terbatas. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat tersebut perlu dibina agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka. *Financial inclusion* (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. *Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.

Namun, hal ini berbeda dengan Menurut World Bank dalam Eka dan Abdulrahman (2017), pemanfaatan lembaga keuangan masyarakat masih sangat minim terutama untuk mengembangkan usahanya. Meskipun kemampuan bagi

pengusaha menengah dalam hal modal masih bias teratasi karna mereka masih bias mendapatkan akses pembiayaan di bank, namun dari para pelaku usaha kecil permodalan menjadi kendala yang besar karna mendapatkan akses pembiayaan di dunia perbankan relatif sulit untuk usaha kecil. Hal ini di karnakan masih adanya jaminan yang dalam pengajuan pembiayaan. Karna itu tidak dapat mungkin di penuhi oleh para pelaku usaha kecil.

Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan *financial inclusion* sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” *financial inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Definisi lain terkait *financial inclusion* menurut World Bank (2008) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Bank dunia dalam Prastowo (2018) dan mohieldin et.al. (2012) membagi dua *factor Financial exclusion*, yaitu: *volutantary factor* dan *involuntary factor*. Volutary factor terjadi karna non user (bukan pengguna) secara skala mereka tidak menggunakan jasa keuangan yang terjadi karna alasan agama atau karna mereka tidak cukup memiliki pengetahuan terkait pentingnya jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan involuntary factor terjadi karna empat alasan. Pertama, kelompok yang tidak dapat diberikan kredit karna berpenghasilan rendah atau memiliki resiko tinggi gagal bayar. Kedua, adanya deskriminasi terhadap kelompok karna latar belakang, sosial, agama atau etnis yang kemudian menyebabkan mereka tidak dapat mengakses layanan keuangan. Ketiga, adanya kerja kontrak atau informasi yang memiliki biaya tinggi, misalnya pinjaman membutuhkan lebih dari satu bulan untuk diproses padahal seharusnya bias di selesaikan dalam hitungan hari. Alasan yang Keempat adalah tingginya harga jasa keuangan untuk kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

Perdebatan terkait sector keuangan terus terjadi dikalangan para pemikir ekonomi, setidaknya terdapat dua teori teori berbeda terhadap sector keuangan. Teori yang pertama di kemukakan oleh Lucas (1988) bahwa sector keuangan tidak memberikan peran penting terhadap perekonomian, Lucas menekankan factor penting dari pembangunan adalah modal manusia itu sendiri dan kemajuan teknologi. Sementara teori pembangunan Goldsmith (1969) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *financial structure* dan pembangunan ekonomi suatu Negara.

financial structure akan memobilisasi pergerakan dana dari pihak kelebihan ke pihak kekurangan dana. Pembangunan sector keuangan telah menjadi faktor penting terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Hadirnya sector keuangan akan mengefisienkan proses pembangunan mobilisasi modal. Mobilisasi modal kepada pihak produktif akan menciptakan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan (Khairul dan Amri, 2017).

Visi nasional Financial Inclusion (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- 2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- 4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.

5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.

6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

B. Keuangan Dalam Prespektif Islam

Sistem keuangan Islam tidak mengizinkan utang melalui pinjaman langsung. Ini menciptakan utang melalui pinjaman berbasis sewa dengan model pembiayaan yaitu murabahah, ijarah, salam, istishna' dan sukuk. Produk-produk ini harus mengikuti aturan sebagai berikut (Chapra, 2008): (1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata dan bukan khayalan; (2) Penjual atau lessor harus memiliki barang-barang yang akan dijual atau disewakan; (3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman; (4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko default yang terkait ditanggung oleh pemberi pinjaman sendiri.

Kondisi pertama membantu menghilangkan risiko transaksi derivatif yang selama ini menjadi factor terbesar atas kehancuran dunia perbankan. Kondisi kedua akan membantu memastikan bahwa penjual atau lessor dapat berbagi risiko untuk mendapatkan bagian atas return sehingga dapat mewujudkan keadilan. Kondisi ketiga dan keempat dapat memotivasi kreditur untuk menerapkan sistem kehati-hatian dalam mengevaluasi risiko kredit. Ini akan mencegah kenaikan utang di atas ekonomi riil.

Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia. Keadilan ini dimaksudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali aspek keuangan. Hal ini diperjelas dalam (QS:57:25) berikut ini: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Salah satu syarat penting untuk menjamin suatu keadilan adalah adanya seperangkat aturan dan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh semua orang dan untuk ditaati. Sistem keuangan berdasar keadilan dapat menjadi kuat dan stabil apabila memenuhi dua kondisi. Pertama, pemodal harus berbagi risiko sehingga kerugian tidak dibebankan sepenuhnya kepada peminjam/pengusaha. Kondisi pertama ini dapat terpenuhi apabila baik pemodal maupun pengusaha secara adil membagi keuntungan atau kerugiannya. Kedua, memperlakukan masyarakat secara adil dengan memberikan persyaratan yang terjangkau dan sesuai kemampuan untuk membayar (Alasrag, 2010)

Sistem keuangan Islam mampu meminimalkan frekuensi krisis keuangan. Mereka memperkenalkan disiplin yang lebih besar ke dalam sistem keuangan dengan

meminta pemodal untuk berbagi risiko. Ini terkait ekspansi kredit terhadap pertumbuhan ekonomi riil dengan kredit untuk pembelian barang nyata dan jasa yang benar-benar dimiliki. Hal ini mengharuskan kreditur menanggung risiko default dengan melarang penjualan utang sehingga dapat mengevaluasi risiko lebih hati-hati. Selain itu, keuangan Islam dapat mengurangi masalah subprime dengan pemberian kredit dengan syarat terjangkau. Ini dapat digunakan sebagai penghematan setelah krisis (Ahmed, 2010).

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Tri Andina Rahayu (2016) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktifitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru perlu memperoleh perhatian serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju pada usaha berdaya saing tinggi.

Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap uaya pengangguran masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tinnginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di

Indonesia, yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satu ciri umum yang melekat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah permodalan yang masih lemah. Padahal modal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri, terlebih pada pengusaha mikro maupun pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil).

Pada kalangan ekonomi lemah ini biasanya terdapat masalah yaitu kekurangan modal, sehingga seringkali mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang kecil kerap kali terjebak dengan kebutuhan permodalan dan untuk mengambil cara cepat pedagang maupun pengusaha mikro akan meminta bantuan permodalan dana atau kredit usaha kepada rentenir atau praktek lintah darat tersebut. Banyak dari pengusaha atau pedagang kecil ini tidak terlalu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kepada si renternir sebelum meminjam sejumlah uang atau modal karena kebutuhan yang sangat mendesak.

Pada akhirnya pengusaha mikro dan pedagang kecil ini terjerat hutang yang makin lama makin bertambah banyak serta bunga pinjamannya menjadi tinggi karena belum dapat atau tidak dapat melunasi apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab atas perjanjian terhadap renternir tersebut sesuai tempo waktu yang telah ditetapkan. Akhirnya akan berdampak negatif pada hasil bidang usahanya yang

lama kelamaan akan menjadi kurang produktif dan menurun bahkan akan dapat mematikan usahanya sendiri atau gulung tikar. Saat ini banyak sekali dijumpai lembaga pembiayaan yang ditawarkan di pedesaan hanya saja hasil kerja lembaga pembiayaan desa dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan belum begitu mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Pentingnya permodalan bagi masyarakat pedesaan dan kota kecil sementara lembaga pembiayaan yang ada belum begitu sukses mengatasinya maka sangat perlu dipikirkan lembaga dan pola pembiayaan yang mampu menyentuh golongan ekonomi lemah di pedesaan dan kota kecil yang benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-nisa/4:29 tentang Perdagangan di jelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS An-nisa' ayat/4:29)

Dalam ayat diatas dijelaskan dalam Al-Quran bahwa janganlah kita sesekali memakan harta sesamat umat manusia dengan jalan yang batil atau melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT kecuali melalui proses perdagangan yang

berlandaskan atas dasar kesepakatan dan suka sama suka serta tidak ada yang merasa dirugikan, dijelaskan pula dalam ayat tersebut agar kita tidak membunuh diri sendiri karena sesungguhnya Allah SWT adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bisa disimpulkan bahwa dalam proses perdagangan atau perniagaan telah diatur dengan jelas dalam agama Islam sebagai pedoman agar kiranya kita tidak melanggar kaidah-kaidah yang berlaku. Dan ayat diatas adalah salah satu contoh rujukan representatif dalam bagaimana kemudian agama mengatur segala aspek kehidupan dalam hal ini tentang perdagangan atau perniagaan.

Menurut Susi Susanti (2017) UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dari kelompok usaha kecil maupun menengah. Hal ini dikarenakan, pelaku UMKM dapat digerakkan atau dijalankan mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. UMKM terdiri dari empat kata, yaitu usaha, mikro, kecil, dan menengah. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung). Mikro adalah kecil, sempit, tipis, di tinjau secara tempat itu hanya pantas untuk pasar. Kecil adalah kurang besar (keadaannya dan sebagainya) dari pada yang biasa.

Menurut Ibid dalam Susi Susanti (2017) UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM pada bab 1 pasal 1, sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha mikro produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun secara tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan definisi bahwa usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:

- 1). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50,000,000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300,000,000,00.

Menurut UU Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki asset diluar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari RP. 200.000.000 dengan omset tahunan Rp 1 Milyar, Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki omset antara Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 Milyar. Sedangkan pengertian UKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UKM merupakan sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang (Fadillah Ramadani dan Yaenal Arifin : 2013 dalam Susi susanti 2017). Jadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha tertentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan jumlah asset dan penghasilan sesuai dengan kriteria masing-masing jenis usaha yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa definisi UMKM pada intinya sama, namun ada sedikit berbeda pengelolaan jumlah nominal asset yang dimiliki oleh suatu usaha dan bisnis khususnya antara usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut Erlih dalam Imam Wahyudi (2018) menjelaskan bahwa suatu usaha dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan. Banyak cara yang digunakan orang dalam menentukan kesuksesan usaha, berbagai parameter yang ditempuh untuk menjustifikasi apakah usaha itu berhasil atau tidak. Bukan hanya itu saja, kesuksesan

usaha pun bisa kita lihat pada satu kondisi pengusaha mencapai targetnya, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan suatu usaha jika pengusaha telah mencapai tujuannya dengan dedikasi yang tinggi, pelayan yang baik, produksi yang berkualitas, dan tentu saja dengan profit yang tinggi.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-jumu'ah ayat/62:10 tentang Perdagangan di jelaskan sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS Al jumu'ah ayat/ 62:10)

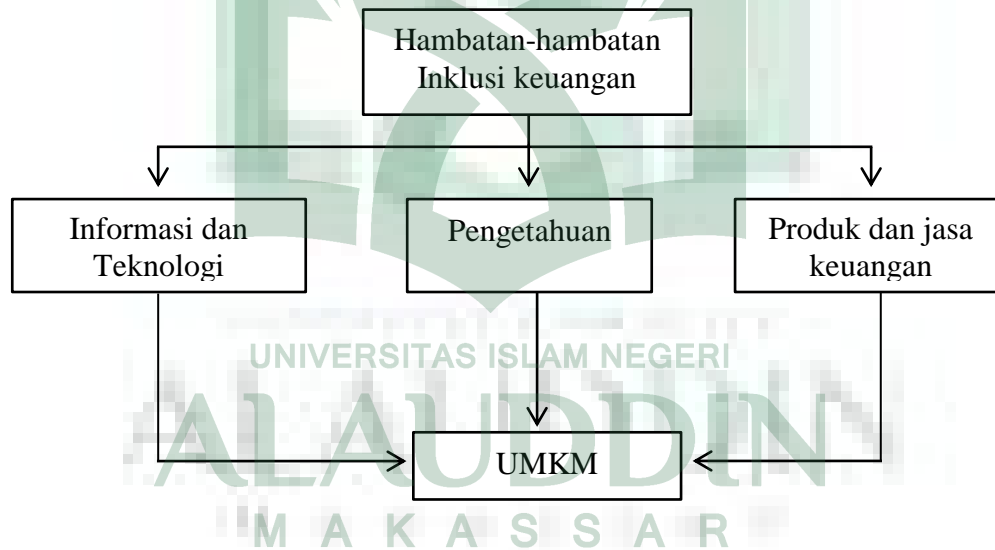
Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa selain melakukan sholat sebagai salah satu kewajiban umat islam, kita juga dianjurkan untuk mencari rezki diatas muka bumi melalui cara yang halal tanpa melanggar hukum yang berlaku dalam agama islam karna hanya dengan melalui cara yang halal itulah yang kemudian mendapat keberkahan atau keberuntungan dari allah s.w.t, sebagai mana kita ketahui bersama bahwa salah satu upaya mencari rezki yang diridhoi dalam agama adalah dengan usaha perdagangan atau perniagaan. Tentunya dalam proses perdagangan atau perniagaan itu tetap menjunjung tinggi kaidah kaidah yang berlaku dalam agama islam itu sendiri, karna hanya dengan melalui proses perdagangan atau perniagaan

seperti itulah sehingga kita kemudian bisa dikategorikan sebagai orang yang beruntung.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Rerangka berpikir penjelasan sementara terhadap persoalan-persoalan yang menjadi objek penelitian. Adapun persoalan-persoalan dalam penelitian ini adalah melihat factor penghambat inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system dalam mereduksi angka kemiskinan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini dapat digambarkan terlebih dahulu kerangka pikirnya yaitu :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir penelitian



Terlihat pada gambar diatas bahwa Hambatan-hambatan Inklusi Keuangan meliputi: 1. Informasi dan Teknologi, bahwa teknologi dan informasi sangat penting bagi masyarakat tetapi sebagian masyarakat belum banyak yang bisa menggunakan

teknologi terutama pada masyarakat menengah kebawah, 2. Pengetahuan, masyarakat belum memahami secara jelas tentang Inkulsi Keuangan karna kurangnya sosialisasi, dan 3. Produk dan jasa keuangan, kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan ketidak mampuan untuk mengakses Inkusi keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

A.Muri Yusuf (2014), Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, konsep, pengertian, karakteristik, simbol, gejala, maupun deskripsi tentang fenomena ini dilaksanakan di lingkup wilayah Kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih dikarenakan Kota Makassar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak, yang sekaligus memiliki UMKM paling banyak di Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Moleong (2014) mengungkapkan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

A.Muri Yusuf (2014) Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan studi kasus yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang seseorang. dengan penelitian studi kasus sangat memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti.

Dengan menggunakan penelitian ini maka akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi atau objek. untuk mendapatkan data, penelitian studi kasus akan menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi kasus dokumentasi yang kemudian akan dianalisis studi kasus akan memahami, menelaah akan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung oleh pelaku UMKM, melalui dari daftar pernyataan atau koesioner yang telah disediakan oleh data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan langsung).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dapat diartikan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.

Chariri, A. (2009) Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview lalu dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui dan data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini dan perasaan pribadi, untuk memperoleh data ini peneliti dapat menggunakan metode wawancara standar.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 sampai 10 orang, yang terdiri para pelaku UMKM, wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan agar wawancara lebih terarah.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Rahardjo, M. (2011) Teknik observasi ini dilakukan melalui 2 alur yaitu langsung dan tidak langsung. Observasi langsung adalah pengumpulan data melalui pengamatan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan gejala-gejala pada objek yang dilakukan secara langsung ditempat kejadian observasi tidak langsung adalah pengumpulan data melalui pengamatan, pencatatan dan gejala-gejala pada objek penelitian, yang pelaksanaannya tidak secara langsung pada objeknya.

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian hasil dari observasi ialah aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

3. Dokumentasi

A.Muri Yusuf (2014) Catatan atau karya seseorang yang sudah berlalu. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita disamping itu ada juga material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.

Subadi Tjipto. (2006) Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mempertahankan kebenaran ilmiah, dan ditegaskan bahwa dasar-dasar pembatasan secara luas diterima oleh ilmuan itu sendiri adalah kesaksian *empirik*, sebuah pernyataan adalah ilmiah jika diuji oleh observasi dan eksperimen. Dokumentasi dalam suatu penelitian kualitatif biasanya berkaitan dengan situasi sosial tertentu, situasi sosial setidaknya mempunyai tiga elemen utama, yaitu (1) lokasi/fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung, (2) manusia-manusia pelaku yang menduduki status/porsi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu, dan (3) kegiatan atau aktivitas peran pelaku pada lokasi/ tempat berlangsungnya sesuatu situasi. Metode dokumentasi ini memberikan gambaran tentang situasi setempat atau *social setting* yang menjadi konteks pembahasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang dimaksud di sini adalah Peran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting, karena peneliti itu sendiri merupakan instrumen, bahkan instrumen utama, di samping instrumen-instrumen yang lainnya sebagai instrumen pendukung peneliti. Urgensi peran peneliti nampak dalam proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian yang meliputi: menentukan informan, wawancara dengan informan, meneliti dokumentasi, membuat rekaman arsip, membuat reduksi data, menyajikan data, menganalisis data, menguji validitas data, dan menginterpretasi hasil penelitian. Bagian lain yang tidak terpisahkan dengan proses penelitian adalah observasi, dimana peran peneliti dituntut untuk melakukan pengamatan terhadap informan bagaimana hambatan yang dihadapi pelaku UMKM

dan masyarakat rentan di Kota Makassar, dalam mengakses keuangan ataupun bantuan modal serta bagaimana harapan mereka terhadap pemerintah untuk aksesibilitas keuangan sehingga mereka dapat hidup jauh lebih baik.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik pengelolaan data

a. Reduksi Data

A.Muri Yusuf (2014) Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemukusan, penye-derhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data lapangan yaitu, pada perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan, pendekatan dalam pengumpulan data.

b. Kesimpulan/verifikasi

Kegiatan dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan utama ketiga. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarnya. Memo dan memo telah ditulis, namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya.

2. Analisis Data

Analisis data tersebut dilakukan dengan cara: a) Analisis wawancara etnografis merupakan penyelidikan terhadap berbagai hal yang telah dikonseptualisasikan oleh informan sebelumnya; b) Analisis domain adalah memperoleh gambaran umum dan penyeluruhan dari objek penelitian atau situasi sosial; c) Analisis

taksonomi adalah menjabarkan domain yang dipilih lebih perinci untuk mengetahui struktur internalnya, setelah melakukan kegiatan pertanyaan struktural; d) Analisis komponensial yaitu mencari ciri-ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan mengontraskan antar elemen; dan e) Analisis tema budaya yaitu mencari hubungan antara domain secara keseluruhan serta dikaitkan dengan tema-tema budaya secara keseluruhan yang menjadi fokus penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka penelitian dalam kualitatif dapat menggunakan berbagai cara antara lain: a) Mem-perpanjang waktu keikutsertaan peneliti dilapangan; b) Meningkatkan ketekunan pengamatan; c) Melakukan triangulasi sesuai aturan.

1. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dilapangan.

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian. Kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukanya.

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik lain dalam pengumpulan data dilapangan akan menentukan pula keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul.

3. Melakukan trigulasi (Triangulation) sesuai aturan.

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Keadaan Geografi dan Iklim

Secara geografis, Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu disebut Ujung Pandang. Yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, yaitu antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan. Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kecepatan angin 5,2 knot dan rata-rata dari kelembapan udara sekitar 77%, sedang temperatur udara sekitar 26,2°-29,3°C. Data ketinggian Kota Makassar bervariasi dimulai dari 0-25 meter dipermukaan laut dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit oleh dua buah sungai yaitu Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Posisi geografis Kota Makassar memiliki batas-batas antara lain:

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Maros
- 2) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Maros
- 3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km² persegi. Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 km², dengan ketinggian topografi dengan

kemiringan 0% sampai 9%. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh 2 sungai yaitu sungai Tallo dan sungai Jeneberang. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2% dan kemiringan lahan 3-15% dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah kebagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang dan Rappocini. Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara.

Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 25°C sampai 33°C. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, februari dan Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan berkisar 114 hari per tahun. Untuk daerah daerah yang mendekati pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada daerah pantai, umumnya sampai bulan April.

Kebijakan pengembangan tata ruang Kota Makassar tahun 2015 menetapkan lima wilayah pengembangan (WP), yaitu 1 di daerah Utara, yaitu kawasan di sebelahatas Sungai Tallo; WP 2 di daerah Timur, yaitu kawasan di sebelah atas Sungai Tallo dan sebelah Timur Jalan Pettarani; Wp 3 di daerah pusat kota, yaitu

sebagai daerah pengembangan vertikal, WP 4 di daerah Barat dan Selatan, yaitu di bawah Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga); WP 5 di daerah perairan laut, yaitu Kepulauan Spermonde Makassar. Pengembangan Kota Makassar dibagi ke dalam empat kawasan Pengembangan yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu lima Kawasan Pengembangan, tiga belas Kawasan Terpadu, tujuh Kawasan khusus, satu Kawasan Prioritas Pantai Losari.

Tiga belas Kawasan Terpadu terdiri dari: (1) Pusat Kota; (2) Pemukiman Terpadu; (3) Pelabuhan Terpadu; (4) Bandara terpadu; (5) Maritim Terpadu; (6) Industri Terpadu; (7) Pergudangan Terpadu; (8) Perguruan Tinggi Terpadu; (9) Penelitian Terpadu; (10) Budaya Terpadu; (11) Olahraga Terpadu; (12) Bisnis dan Pariwisata Terpadu; (13) Bisnis Global. Sedangkan tujuh kawasan khusus meliputi:

- (1) Kawasan Khusus Maritim; (2) Kawasan Khusus Pengembangan koridor Sungai Tallo; (3) Kawasan Khusus Pengembangan koridor Sungai Jeneberang; (4) Kawasan Khusus pengembangan dan pengendalian Pantai Makassar; (5) Kawasan Khusus konservasi warisan budaya; (6) Kawasan Khusus pusat energi dan bahan bakar; (7) Kawasan Khusus tempat pembuangan dan pemrosesan sampah.

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kota Makassar hingga Juni tahun 2018 tercatat sebanyak 1.769.920 jiwa. Sementara itu jumlah komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota

Makassar yaitu sekitar 97,99% yang berarti setiap 100 orang penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. (Sumber, Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2018)

Berdasarkan presentase penduduk miskin yang ada di Kota Makassar, konsentrasi terbesar berada di Wilayah Kecamatan Tamalate sebesar 9.315 kepala keluarga atau 14,98%, dan Kecamatan Tallo sebesar 8.158 kepala keluarga atau 13,12%. Jumlah kepala keluarga perkecamatan menurut tingkat kesejahteraannya.

Pada tahun 2014 pencari kerja pada dinas tenaga kerja Kota Makassar sebanyak 10.623 orang terdiri dari laki-laki 5.276 dan perempuan 5.347 orang. Penduduk Kota tercatat sebanyak 61,04% angkatan kerja terdiri dari yang bekerja sebanyak 53,61% dan Upah Minimum Kota sebanyak 7,43%. Sedangkan bukan angkatan kerja sebesar 38,96% yang terdiri dari yang masih duduk dibangku sekolah sebesar 14,587%, mengurus rumah tangga 19,36%, lainnya sebesar 5,03%. Sedangkan Upah Minimum Kota terbuka sebesar 12,17%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 61,04%. (Sumber, Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2018)

Tenaga Kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaannya guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk yang tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja yaitu berumur 16-54 tahun. Berikut adalah data tenaga kerja kota Makassar.

Pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 5.884 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.858 orang dan perempuan 3.026 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan sarjana menempati peringkat pertama yaitu sekitar 41,13 persen disusul tingkat pendidikan SMA sekitar 38,92 persen.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara tentang Analisis Hambatan-hambatan Inklusi Keuangan melalui Fintech System terhadap UMKM di kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber (Informan). Data tentang Hambatan inklusi keuangan melalui fintech system terhadap umkm di Kota Makassar diperoleh melalui wawancara dengan informan :

1. “Nurlaela Mallo pekerjaan Wiraswata (Warung Makanan) saya mendirikan usaha warung makan ini baru 2 bulan dana untuk membuka usaha dengan uang sendiri. Hasil penjualan setiap hari biasanya dapat Rp. 500.000 dan yang didapat untuk penjualan hari ini diluar dari modal awal diputar untuk penjualan besok harinya. Karna saya malas berurusan dengan bank, takut pinjam uang di Bank tidak mau terbebani dengan pembayaran perbulannya. saya tidak pernah meminjam uang lewat HP takut dan tidak tau menggunakan pinjaman lewat HP ”

(Wawancara bersama Nurlaela Mallo, tanggal 14 Oktober 2019)

Wawancara bersama ibu Nurlaela di tempat warung makan miliknya yang berada di area sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Disaat itu informan mencoba mengutarakan dimana ia memulai pekerjaan dan usaha warung makannya. ibu nurlaela adalah seorang pensiunan PNS (kepala dinas Pariwisata), dan setelah

pensiun ibu nurlaela pun memulai usaha dan mendirikan warung makan disalah satu tempat yang berada di kota Makassar yaitu di kecamatan Tamalate, usaha ibu lela baru berjalan 2 bulan pada saat itu dana yang digunakan untuk usahanya memakai modal sendiri, dari usaha warung makannya itu penghasilan yang didapat dari penjualannya sekitar Rp. 500.000 /hari. Namun hasil yang didapat setiap harinya diputar lagi menjadi modal untuk penjualan besok harinya. Namun ibu lela tidak ingin meminjam uang di Bank karna tidak mau terbebani dengan pembayaran setiap bulan dan merasa takut untuk mengambil uang pinjaman di Bank. Ibu lela juga tidak ingin menggunakan pinjaman lewat HP (Android) berbasis teknologi karna takut dan tidak mengerti cara menggunakan pinjaman uang lewat HP (Android) yang berbasis teknologi.

Menurut Kalsoom Zulfiqar (2016) berpendapat bahwa Inklusi Keuangan dianggap sebagai sarana penting untuk mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusi keuangan memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dengan meningkatkan akses mereka ke peluang ekonomi dan memperluas pilihan mereka, yang pada akhirnya membuat agen ekonomi lebih produktif dan efisien. Ini bisa mengarah pada pengentasan kemiskinan dengan dua cara. Pertama, peningkatan ketersediaan sumber daya keuangan meningkatkan akses ke pendidikan, peningkatan wirausaha & pengembangan manusia yang membantu pengentasan kemiskinan. (Banerjee & Newman, 1993; Galor & Zeira, 1993; Aghion & Bolton, 1997). Akses berbasis luas kedua untuk produk dan layanan keuangan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien, sehingga memberikan leverage

keuangan yang lebih baik bagi mereka yang kurang mampu untuk pengentasan kemiskinan. Kurangnya sumber daya keuangan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan. Kakwani dan Pernia (2000) menemukan bahwa akses yang lebih baik ke keuangan dapat mengarah pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang signifikan. Beck et al. (2004, hal. 18) mengamati bahwa "Di negara-negara dengan perantara keuangan maju, pendapatan kuintil termiskin tumbuh lebih cepat daripada PDB rata-rata per kapita, ketimpangan pendapatan turun lebih cepat, pengurangan kematian bayi lebih besar dan pendaftaran anak di sekolah dasar meningkat". Selain itu, ketidaksetaraan pendapatan lebih banyak terjadi di negara-negara di mana segmen populasi yang lebih besar menolak akses ke layanan keuangan. Beck et al. (2004) menyimpulkan bahwa jika permintaan jasa keuangan tidak terpenuhi melalui sistem keuangan formal, maka secara otomatis akan bertambah.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Muliadi yang bekerja sebagai Wiraswasta (Warung Makan), yang menyampaikan bahwa:

2. "saya memulai usaha warung makan ini belum cukup 1 tahun dengan meminjam modal dari keluarga, saya takut meminjam ke bank karna malu dan takut berurusan dengan pihak bank yang terkadang banyak prosedurnya yang harus dipenuhi, saya juga tidak mau meminjam modal lewat aplikasi di HP karna saya belum mengetahui pasti persyaratannya, itu yang membuat saya takut meminjam uang lewat aplikasi HP, modal awal untuk membangun usaha warung makan saya sekitar 100 juta"

(Wawancara bersama Muliadi, tanggal 14 Oktober 2019)

Wawancara dengan Muliadi disalah satu tempat warung makan miliknya yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar disaat itu pula

informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha warung makan. Sebelum pak muliadi memulai usahanya beliau terlebih dahulu belajar di tempat kursus memasak selama kurang lebih satu bulan sampai kemudian Pak Muliadi bisa memasak tidak lama setelah itu ia mulai mencari modal usaha untuk warung makannya dengan meminjam dari keluarga untuk menambah modalnya yang belum cukup waktu itu, setelah modal terkumpul barulah kemudian pak muliadi berani memulai usaha warung makan, pendapatan yang dihasilkan dari usaha rumah makan tersebut sekitar Rp. 800.000.00/hari, dari hasil pendapatannya itu kemudian beliau putar lagi untuk jadi modal penjualan untuk besok harinya. Alasan pak muliadi kenapa kemudian ia takut untuk meminjam ke pihak bank karna merasa peminjaman modal melalui bank memiliki banyak prosedur dan persyaratan yang tidak mudah, begitu juga dengan peminjaman melalui HP atau berbasis teknologi selain tidak mengerti prosedur peminjamannya, ia juga takut jika ditipu oleh pihak penyedia dana dari HP atau berbasis teknologi tersebut.

Menurut Sandra dan Fernando (2013), Bahwa Inklusi keuangan yaitu suatu proses yang memastikan akses, penggunaan, dan ketersediaan sistem keuangan formal kepada semua anggota dalam suatu perekonomian. Subjek telah dipelajari secara luas dan beberapa inisiatif telah diluncurkan secara global untuk mempromosikan inklusi keuangan kepada populasi. Menyadari pentingnya pembangunan, inklusi keuangan juga dimasukkan dalam Tujuan Milenium PBB. Sistem keuangan yang mencakup semua memungkinkan keluarga untuk mengatur pendapatan mereka dan merencanakan pengeluaran di masa depan; dan pada level

makro, ia membangun semangat kewirausahaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga memungkinkan visibilitas pemerintah yang lebih besar terhadap sistem fiskal, memfasilitasi peningkatan legalitas transaksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inklusi keuangan terkait dengan pembangunan - disertasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini, dengan menguji apakah inklusi keuangan dan pengembangan berkorelasi.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Irsan yang bekerja sebagai Wiraswasta (Warung ES Teler), yang menyampaikan bahwa:

3. “saya memulai usaha sekitar 2 tahun lalu dengan memakai modal awal sendiri, saya takut meminjam dengan pihak di Bank, terlalu banyak prosedur dan persyaratannya yang harus dipenuhi.saya juga tidak ingin meminjam uang melalui Aplikasi HP Android karna saya belum tau sitem pembayaran, prosedur peminjamannya dan takut meminjam uang diaplikasi HP Android, penghasilan yang saya dapat setiap hari Rp. 600.000 /hari”

(Wawancara bersama Irsan, tanggal 14 Oktober 2019).

Wawancara dengan Irsan disalah satu tempat warung Es Teler miliknya yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di saat itu pula informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha Es Teler. Pak Irsan sudah menjalani usaha Es Teler selama 2 tahun, sebelum memulai usahanya pak irsan terlebih dahulu mengumpulkan modal sampai dirasa cukup untuk mendirikan usaha es telernya, pak Irsan mendapatkan modal dari tabungannya sendiri, sempat ada tawaran dari temannya untuk meminjam modal usaha melalui aplikasi yang pinjaman dana yang ada di HP atau berbais teknologi, akan tetapi pak Irsan merasa tidak mengerti dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, intinya pak Irsan

dalam hal ini masih merasa ragu dan takut jika meminjam uang melalui HP atau yang berbasis teknologi, pak Irsan juga tidak ingin meminjam modal melalui bank karna tidak ingin terbebani dengan tagihan dari bank karna menganggap usaha es telernya tidak memungkinkan untuk membayar tagihan setiap bulannya dari pihak bank itu sendiri. dari usaha es telernya itu pak Irsan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 600.000 /hari. Dari pendapatan hariannya itu kemudian pak Irsan menjadikannya modal lagi untuk usaha Es Teler besok harinya.

Menurut Satya (2010) Inklusi keuangan mengacu pada penyampaian sistem keuangan suatu ekonomi. Pemerintah India mendefinisikan inklusi keuangan 'sebagai proses memastikan akses ke layanan keuangan dan kredit yang memadai tepat waktu di mana dibutuhkan oleh kelompok-kelompok rentan seperti kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau' (Komite Rangarajan , 2008). Karena sebagian besar layanan keuangan dikoordinasikan melalui bank, kami dapat memperkirakan inklusi keuangan melalui inklusi perbankan. Faktanya, Leeladhar (2005) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai 'penyampaian layanan perbankan istilah inklusi keuangan dan inklusi perbankan sebagai sinonim. Dalam konteks bank, inklusi keuangan menyangkut penyebaran kegiatan perbankan di antara berbagai bagian populasi. Domain kegiatan bisa sangat besar dan dapat bervariasi dari satu negara ke negara1. Misalnya, di Inggris tiga dimensi utama dari inklusi keuangan adalah akses ke perbankan, akses ke kredit yang terjangkau dan akses ke nasihat uang tatap muka. Walaupun ketiga dimensi ini juga penting bagi India, sebagian besar kredit bank di negara-negara seperti India harus

diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan bagian ekonomi yang terbelakang secara ekonomi di negara tersebut. Penting juga untuk memastikan bahwa orang yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah tidak menghadapi kesulitan dalam membuka rekening bank karena prosedur yang terlibat dalam proses tersebut.

Menurut Mandira Sarma (2008) telah mengidentifikasi bahwa inklusi keuangan sebagai manifestasi eksklusi sosial. Di dalam kertas kami telah mencoba studi lintas negara pada faktor-faktor yang terkait dengan keuangan. Dengan menggunakan indeks inklusi keuangan, kami pertama-tama menggambarannya secara luas hubungan antara inklusi keuangan dan pengembangan manusia. Kami menemukan tingkat perkembangan manusia dan inklusi keuangan berkorelasi positif sangat kuat, meskipun ada beberapa pengecualian. Analisis empiris kami menegaskan bahwa pendapatan yang diukur dengan PDB per kapita adalah faktor penting dalam menjelaskan tingkat inklusi keuangan di suatu negara. Melampaui PDB per kapita, kami menemukan bahwa ketimpangan pendapatan, melek huruf orang dewasa dan urbanisasi juga faktor penting. Selanjutnya, konektivitas dan informasi fisik dan elektronik ketersediaan, ditunjukkan oleh jaringan jalan, penggunaan telepon dan internet, juga bermain positif peran dalam meningkatkan inklusi keuangan. Temuan ini menguatkan pernyataan bahwa eksklusi keuangan memang merupakan cerminan dari eksklusi sosial, karena negara-negara memiliki rendah PDB per kapita, tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif lebih tinggi, tingkat melek huruf yang rendah, rendah urbanisasi dan konektivitas yang buruk tampaknya kurang inklusif secara

finansial. Dari antara variabel sektor perbankan, kami menemukan bahwa proporsi aset berkinerja berbanding terbalik dengan inklusi keuangan, menunjukkan upaya itu oleh berbagai negara menuju inklusi keuangan yang lebih besar belum memberikan kontribusi apa pun ke aset non-performing dari sistem perbankan. Rasio aset modal (CAR) adalah terlihat berhubungan negatif dengan inklusi keuangan. Dengan kata lain, ketika CAR suatu negara tinggi, sistem perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam membuka pintunya untuk yang dikecualikan secara finansial. Kepemilikan asing di sektor perbankan terlihat negatif mempengaruhi inklusi keuangan, sementara kepemilikan pemerintah tidak memiliki efek signifikan. Akhirnya, suku bunga tampaknya tidak berhubungan secara signifikan inklusi keuangan.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Niken yang bekerja sebagai Wiraswasta (Warung Makan), yang menyampaikan bahwa:

4. “sebelumnya saya sempat ada yang menawari untuk meminjam melalui aplikasi yang ada di hp android, saya juga sempat mendengar dari teman dan juga dari social media namun saya masih tidak berani untuk meminjam modal usaha melalui aplikasi tersebut, saya pribadi masih merasa takut dan ragu untuk meminjam disitu, karna terus terang saya masih kurang paham akan prosedur dan persyaratannya selain dari pada itu, dilingkungan tempat saya menjual juga tidak ada yang memakai atau meminjam modal dengan aplikasi itu, hal ini yang kemudian semakin menambah rasa ragu saya terhadap model peminjaman tersebut, teman – teman penjual disini pun merasakan hal yang sama atau berpendapat yang sama dengan saya tentang model peminjaman bebrbasis aplikasi di hape android. Saya lebih memilih untuk memakai modal pribadi dalam menjalankan usaha rumah makan saya, karna dengan memakai modal usaha sendiri, saya tidak akan terbebani dengan tagihan rutin setiap bulannya, mengingat pendapatan yang saya hasilkan setiap bulannya yang tidak menentu.

(Wawancara bersama Niken, tanggal 14 Oktober 2019)

Wawancara dengan ibu Niken disalah satu tempat warung makan miliknya yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di saat itu pula informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha warung makan. Sebelum Ibu Niken memulai usahanya beliau terlebih dahulu mengumpulkan modal usahanya dari uang tabungan pribadinya, dari hasil penjualan di warung makannya itulah yang kemudian beliau pakai untuk mengembangkan usahanya, beliau sempat ditawari oleh pihak aplikasi peminjaman berbasis android atau teknologi, namun ibu niken masih merasa takut dan ragu untuk memakai jasa peminjaman tersebut, lebih lanjut menuturkan bahwa masih tidak mengerti akan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi atau hal – hal apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin meminjam modal melalui aplikasi yang berbasis teknologi tersebut, beliau beranggapan bahwa meminjam modal dengan cara seperti itu sangat sulit dan membingungkan, ibu niken kemudian menambahkan bahwa teman – teman penjual yang ada di sekitar area tempat warung makan beliau belum ada yang memakai jasa atau meminjam modal melalui aplikasi berbasis teknologi tersebut dengan alasan yang sama. Ibu Niken juga tidak ingin terbebani dengan tagihan setiap bulannya apabila meminjam dengan aplikasi tersebut mengingat keuntungan atau pendapatan dari usaha warung makannya yang masih tidak menentu, sementara sistem pembayaran melalui jasa peminjaman berbasis android dan teknologi harus tepat waktu setiap bulannya dan tidak mengenal kata kompromi.

Menurut Minakshi Ramji (2009) Inklusi keuangan sebagai pengiriman tepat waktu layanan keuangan untuk bagian masyarakat yang kurang beruntung. Definisi

sederhana ini mencakup konsep dua dimensi utama (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2006). Pertama, inklusi keuangan mengacu pada pelanggan yang memiliki akses ke berbagai layanan keuangan formal, dari kredit sederhana dan layanan tabungan hingga yang lebih kompleks seperti asuransi dan pensiun. Kedua, inklusi keuangan menyiratkan bahwa pelanggan memiliki akses ke lebih dari satu penyedia layanan keuangan, yang memastikan berbagai pilihan kompetitif. Mengalir dari definisi ini, pengecualian keuangan akan berarti ketidakmampuan mereka yang kurang beruntung untuk mengakses layanan keuangan. Berbagai kendala dapat menyebabkan pengecualian keuangan; hambatan termasuk geografi (membatasi akses fisik), peraturan (kurangnya bukti identifikasi formal atau produk yang sesuai untuk rumah tangga miskin), psikologi (takut staf lembaga keuangan, struktur, produk keuangan rumit, dll.), informasi (kurangnya pengetahuan mengenai produk dan prosedur), dan kecerdasan finansial yang rendah (pendapatan rendah dan disiplin keuangan yang buruk), antara lain. Dalam konteks India, inklusi keuangan, menurut pidato anggaran 2006-07 Menteri Keuangan, didefinisikan sebagai “proses memastikan akses ke kredit yang tepat waktu dan memadai dan layanan keuangan oleh kelompok rentan dengan biaya yang terjangkau.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh pak yudi yang bekerja sebagai penjual pakaian (wiraswasta), yang menyampaikan bahwa :

5. “sy memulai usaha penjualan baju dengan modal yang saya tabung sendiri dan sebagian lagi dari bantuan orang tua saya, usaha penjualan baju ini saya rintis awal tahun 2008 sampai sekarang awal mulanya bertempat di sentral kemudian saya pindah tempat penjualan di jl. Sunu kecamatan tallo. Alasan

saya tidak ingin meminjam melalui pinjaman online atau HP android karna saya tidak mengerti masalah administrasinya dan menurut saya peminjaman online juga banyak bahayanya, sempat saya dengar dari teman kalau peminjaman melalui HP android juga mempunyai syarat adanya bunga pinjama.”

(Wawancara bersama Yudi, tanggal 15 Oktober 2019)

Wawancara dengan pak yudi disalah satu tempat penjualan pakaian miliknya yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tallo, Kota Makassar di saat itu pula informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha penjualan baju. Pak yudi sudah menjalani usaha penjualan baju selama 11 tahun, dimulai dari tahun 2008 sampai sekarang, sebelumnya pak yudi merintis usahanya dipasar sentral kemudian pak yudi pindah ke jl. Sunu, ketika memulai usahanya pak yudi terlebih dahulu mengumpulkan modal dari uang tabungannya sendiri dan sebagian lagi dari dana orang tuanya, sempat ada tawaran dari temannya untuk meminjam modal usaha melalui aplikasi yang pinjaman dana yang ada di HP atau yang berbasis teknologi, akan tetapi pak yudi merasa tidak mengerti dengan proses administrasinya yang menurutnya sulit dipahami, selain dari itu menurut pak yudi merasa bahwa peminjaman melalui pinjaman online atau HP android cenderung berbahaya, kemudian lebih lanjut pak yudi juga menganggap bahwa bunga pinjaman yang menjadi persyaratan dari peminjaman online atau HP android yang berbasis teknologi terlalu tinggi sehingga pak yudi berfikir bahwa pinjaman seperti itu tidak sesuai dengan usaha penjualan bajunya yang berpenghasilan sedikit.

Menurut Annamaria Lusardi (2010) Dalam temuannya bahwa dari program pendidikan keuangan. Beberapa temuan dalam mendukung pendidikan inklusi

keuangan di sekolah menengah. Pertama, jika pengetahuan keuangan diperoleh dari orang tua atau interaksi dengan orang lain, mungkin bermanfaat untuk memberikan pendidikan finansial di sekolah menengah kepada mereka yang orang tua atau temannya tidak memiliki gelar sarjana atau tidak memiliki pengetahuan keuangan. Menurut perkiraan kami, sementara kemampuan kognitif berperan dalam menjelaskan perbedaan dalam pengetahuan pendidikan inklusi keuangan di antara kaum muda, itu bukan satu-satunya faktor yang relevan. Dengan demikian, pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan pendidikan inklusi keuangan. dan yang paling penting, mungkin bermanfaat untuk memberikan pendidikan inklusi keuangan sebelum orang-orang virtual terlibat dalam kontrak keuangan dan terutama mereka mulai membuat keputusan finansial. Dalam hal ini, mungkin penting untuk meningkatkan efektivitas program melek finansial yang saat ini ditawarkan di sekolah menengah. Dengan adanya pendidikan tentang inklusi keuangan seseorang mampu mengelola dan mengakses keuangannya lebih baik.

Menurut M. Mostak (2015) Menjelaskan bahwa inklusi keuangan dalam mempromosikan kesejahteraan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses kelompok-kelompok yang kurang beruntung ke layanan keuangan dasar dalam bentuk penggunaan yang lebih besar dari rekening bank dan tabungan formal, sedikit perhatian telah dilakukan. dikhususkan untuk menyelidiki apakah tujuan pembangunan tersebut memiliki konsekuensi pada kesehatan bank. Masalah yang paling menantang bagi lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses ke keuangan adalah biaya operasi yang tinggi dan risiko yang terkait dengan pelayanan,

pemantauan dan administrasi pinjaman untuk setiap rumah tangga dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kekurangan dokumentasi, jaminan, dan sejarah kredit yang disyaratkan. Oleh karena itu, memperluas akses kelompok berpenghasilan rendah ke layanan keuangan formal selalu dianggap sebagai strategi antagonis, yang dapat mengurangi kinerja bank. Karena eksklusi keuangan telah diidentifikasi oleh pembuat kebijakan sebagai penghalang utama untuk pembangunan secara global, memperluas layanan perbankan kepada orang-orang telah diprioritaskan oleh pemerintah untuk menjadikan inklusi keuangan menjadi kenyataan.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh ibu Ninda Karisma atau yang biasa dipanggil ibu ninda, yang bekerja sebagai penjual jilbab (wiraswasta), yang menyampaikan bahwa :

6. “saya memulai usaha saya saat masih kuliah dengan modal sendiri, modal awal saya untuk usaha penjualan jilbab ini sekitar Rp. 5.000.000, saya tidak mau meminjam ke bank karna tidak mau ribet dengan administrasi di bank, saya juga merasa tidak mampu membayar tagihan setiap bulannya, saya juga tidak mau pinjam lewat HP karna memang saya tidak tahu kalau ada peminjaman seperti itu, rata – rata juga penjual di sini kebanyakan tidak tahu soal peminjaman melalui HP itu, karna tingkat pendidikan penjual di sini juga rendah, mungkin jika ada informasi yang jelas yang tentang adanya peminjaman lewat HP entah itu melalui brosur atau pemberitahuan lainnya dan menjelaskan keunggulan dan bentuk peminjamannya seperti apa, mungkin saya juga tertarik dengan peminjaman lewat HP itu”
(Wawancara bersama Ninda, tanggal 15 Oktober 2019).

Wawancara dengan ibu ninda karisma disalah satu tempat penjualan jilbab miliknya yang berada di sekitar jl.sunu, Kota Makassar di saat itu pula informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha penjualan jilbabnya. Ibu ninda karisma sudah lama yaitu semenjak kuliah, sebelum memulai usahanya ibu ninda

terlebih dahulu mengumpulkan modal sekitar Rp. 5.000.00 yang ditabung, ibu ninda juga sempat menjelaskan kenapa dirinya tidak meminjam modal melalui HP android berbasis teknologi karna sebelumnya memang tidak tahu akan adanya proses peminjaman seperti itu, selain tidak adanya informasi secara massif yang ia dapat soal peminjaman itu, juga tidak adanya teman penjual lain yang memakai aplikasi peminjaman lewat HP android berbasis teknologi itu di sekitar tempat jualannya, hal ini yang kemudian mendukung kenapa kemudian ia tidak memakai aplikasi HP berbasis teknologi itu untuk meminjam modal usahanya, lebih jelasnya mengutarakan pendapatnya bahwa seandainya ada informasi yang jelas baik itu berupa brosur atau sarana lain yang dapat menjelaskan secara jelas tentang prosedur dan juga keunggulan serta item apa saja yang ditawarkan dan cara memakainya mungkin ibu ninda juga tertarik untuk meminjam modal melalui HP android itu, lebih jauh ibu ninda juga sempat menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab tidak adanya penjual yang meminjam modal melalui HP android berbasis teknologi dikarenakan tingkat pendidikan para penjual di wilayahnya yang masih rendah, tingkat pendidikan yang rendah ini kemudian menjadi hambatan bagi para penjual untuk menggunakan peminjaman seperti itu yang tergolong sudah canggih karna hanya dengan HP android yang berbasis teknologi kita sudah bisa meminjam modal usaha.

Menurut Monique (2011) Literasi keuangan sebagai Kemampuan untuk membuat penilaian berdasarkan informasi dan untuk mengambil tindakan efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang saat ini dan di masa depan. Literatur sering menggunakan tiga istilah - literasi keuangan, pendidikan keuangan, dan

kemampuan finansial - yang tumpang tindihnya dapat menyebabkan kebingungan. Namun, mereka adalah potongan teka-teki yang berbeda, bagian dari keseluruhan, atau langkah menuju tujuan inklusi keuangan. Literasi keuangan dikaitkan dengan konsumen yang memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu dirinya sendiri tentang produk yang dia beli dan untuk memahami kontrak yang dia tandatangani. Menggabungkan lima pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pendidikan finansial adalah alat utama untuk mencapai tujuan multi-dimensi ini. Kemampuan keuangan, di sisi lain, adalah tentang konteksnya; itu melibatkan sektor jasa keuangan dalam tanggung jawabnya untuk menawarkan produk yang tepat ke berbagai target pasarnya. Inklusi keuangan menyiratkan keselarasan penawaran dan permintaan, di mana konsumen yang melek finansial memiliki peluang untuk menerapkan pengetahuan mereka di pasar pilihan produk yang sesuai. Ketiga istilah ini selanjutnya diklarifikasi di bawah ini. Literasi keuangan: Definisi untuk istilah ini bervariasi berdasarkan sumber dan konteks. Sebagian besar berasal dari negara maju di mana literasi keuangan telah menerima perhatian jauh lebih banyak daripada di negara berkembang. Namun, landasan bersama adalah pentingnya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (GAO) menawarkan definisi yang luas berlaku untuk Ini mencakup kemampuan untuk memahami pilihan keuangan, merencanakan masa depan, membelanjakan dengan bijak, dan mengelola tantangan yang terkait dengan peristiwa kehidupan seperti kehilangan pekerjaan, menabung untuk pensiun, atau membayar pendidikan anak. "Tentu saja, melek finansial dapat berarti hal yang

berbeda untuk orang yang berbeda; di negara maju, melek finansial mungkin memerlukan pengetahuan tentang kode pajak, persyaratan asuransi, dan kartu kredit, sedangkan untuk yang 'tidak memiliki rekening bank' di negara berkembang, melek finansial lebih mungkin ditentukan oleh konsep dasar tabungan yang aman dan aman, anggaran dan bijaksana peminjaman.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh ibu fitria Idris yang memiliki usaha warung makan (wiraswasta), yang menyampaikan bahwa :

7. “saya tidak pernah meminjam modal usaha di bank untuk usaha saya yang masih tergolong usaha yang kecil kecuali jika saya ingin memulai usaha yang membutuhkan modal besar mungkin saya juga akan meminjam di bank, untuk peminjaman melalui HP android, saya juga sempat baca diartikel dan surat kabar soal itu, hanya saja saya tidak tertarik untuk meminjam melalui HP karna menurut saya peminjaman modal seperti itu berbeda dengan bank, kalau bank sudah pasti menjamin privasi kalau lewat HP mungkin tidak bisa menjamin privasi saya, kan hutang itu privasi, ada banyak lagi info yang saya dapat tentang peminjaman seperti itu dari teman dekat dan keluarga tapi memang saya tidak berniat mempelajari lebih lanjut mengenai proses peminjaman seperti itu, saya pribadi juga takut diteror oleh penagih dari pihak penyedia modal pinjaman berbasis android itu”

(Wawancara Fitria Idris ,tanggal 15 Oktober 2019)

Wawancara dengan ibu fitria idris disalah satu tempat usaha warung makan miliknya yang berada di sekitar jl. toddopuli, Kota Makassar saat itu informan mencoba mengutarakan pendapatnya saat ditanya perihal peminjaman melalui bank dan peminjaman berbasis HP android atau teknologi, dalam hal peminjaman modal melalui bank sebenarnya beliau biasa meminjam di bank tapi dalam hal usaha warung makannya ibu fitria tidak memerlukan modal dari bank karna menganggap usaha warung makannya masih kecil dan tidak memerlukan modal yang besar. Ibu Fitria

juga sempat menuturkan bahwa ia akan meminjam ke bank jika usaha yang ia ingin jalankan memerlukan modal yang besar. Perihal peminjaman berbasis HP android, ibu fitria sudah banyak mendapatkan informasi baik itu dimedia cetak, artikel dan juga keluarga serta kerabatnya, hanya memang beliau tidak pernah tertarik atau mencoba mempelajari lebih lanjut mengenai prosedur dan proses pinjaman berbasis HP android atau teknologi tersebut. Beliau merasa jika meminjam melalui HP tidak bisa menjamin privasi dari peminjam modal atau pelanggan, lebih lanjut beliau juga terlalu banyak mendengar informasi negative mengenai peminjaman berbasis HP android tersebut, hal ini yang kemudian menyebabkan Ibu Ftria takut untuk berurusan penyedia pinjaman berbasis android atau teknologi tersebut. Selain itu ibu fitria juga beranggapan bahwa bunga pinjaman berbasis android atau teknologi lebih tinggi dibanding melalui pihak bank.

Menurut Onaolapo (2015) mendefinisikan bahwa akses keuangan adalah kebijakan akses penting yang digunakan oleh pemerintah dalam memerangi dan merangsang pertumbuhan karena kemampuannya untuk memfasilitasi alokasi sumber daya produktif yang efisien, sehingga mengurangi biaya modal. Proses ini sebaliknya disebut sebagai sistem keuangan inklusif dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari, serta mengurangi pertumbuhan sumber kredit informal (seperti pemberi pinjaman uang), yang sering dianggap eksploitatif. Sistem keuangan inklusif sekarang dikenal luas sebagai prioritas kebijakan di banyak negara dengan inisiatif yang datang dari regulator keuangan, pemerintah dan industri perbankan.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh ibu andi dewi nindia sari yang memiliki usaha penjualan jilbab (wiraswasta), yang menyampaikan bahwa :

8. “saya pernah sekali meminjam di bank sekitar Rp. 30.000.000 juta tapi itu sudah lama sekali, sekarang saya sudah tidak memilih bank sebagai modal untuk usaha saya, saya tidak ingin terbebani lagi soal hutang piutang lagi, saya lebih memilih untuk memakai uang pribadi saya dalam mengembangkan usaha penjualan jilbab saya, saya lebih memilih memutar modal karna sudah tidak mau ambil pusing dengan tagihan dari pihak bank, jika ditanya soal peminjaman berbasis Hp android atau aplikasi di playstore, terus terang sering dengar kabar atau berita itu dari teman dan juga di sosial media, Cuma saya pernah punya pengalaman buruk soal itu, pernah suatu hari salah satu dari konsumen saya meminjam uang melalui HP android, terus nomor yang ia daftarkan adalah nomor saya, jadi saya yang ditelpon dan ditagih oleh pihak peminjam modal berbasis android tersebut, disitu kemudian mersa ragu karna berfikir prosedur peminjamannya kurang bagus, saya memasarkan jilbab saya bukan hanya di toko, tapi saya juga memanfaatkan sosial media seperti whatsapp dan facebook, dan terus terang itu memudahkan usaha saya untuk dipasarkan secara luas.”

(Wawancara bersama Andi Dewi, tanggal 15 Oktober 2019)

Wawancara dengan ibu andi dewi nindia sari di salah satu tempat usaha penjualan jilbab online miliknya yang berada di sekitar panakukang, Kota Makassar saat itu informan mencoba mengutarakan pendapatnya saat ditanya perihal peminjaman melalui bank dan peminjaman berbasis HP android atau teknologi, dalam hal peminjaman modal melalui bank sebenarnya pernah meminjam di bank tapi itu sudah lama sekali, tapi setelah lunas Ibu Andi Dewi tidak berminat lagi untuk meminjam di bank dikarenakan lebih memilih untuk memakai uang pribadi untuk dijadikan modal usaha. Kemudian ketika ditanya soal peminjaman berbasis HP android dan teknologi, Ibu Andi Dewi tidak pernah berurusan atau berniat meminjam modal melalui itu, selain karna tidak berani dan tidak mengerti prosedur

peminjamannya, ibu andi dewi juga trauma terhadap peminjaman seperti itu, beliau sempat mengutarakan pengalaman buruknya berurusan dengan pihak penyedia pinjaman uang tersebut, salah satu dari pelanggan atau konsumennya pernah meminjam dan memakai nomor telpon dari ibu andi dewi, ketika ada proses penagihan secara otomatis beliaulah yang ditelpon dan ditagih oleh pihak tersebut, hal ini yang kemudian menambah keraguan dari ibu andi dewi untuk berurusan dengan penyedia pinjaman berbasis android atau teknologi, meskipun sebenarnya sudah dapat penjelasan lebih terkait peminjaman seperti dari media sosial dan kerabat, akan tetapi terlanjur trauma. Jika dilihat dari segi pemahaman akan peminjaman berbasis hp android atau teknologi tersebut sebenarnya Ibu Andi Dewi mampu memahami konsep dari peminjaman seperti itu, karna mengingat ibu andi dewi sudah tidak asing dengan sosial media, hal ini yang kemudian sejalan dengan peminjaman berbasis android atau teknologi yang terbilang canggih.

Menurut Sandra J. Huston (2010) Penciptaan program pendidikan keuangan yang dirancang khusus untuk meningkatkan literasi keuangan telah dipandang sebagai solusi untuk mengurangi masalah keuangan yang dihadapi individu dan keluarga. Namun, literatur menawarkan bukti beragam bahwa pendidikan memberikan manfaat yang terukur (Fox, Bartholomae, dan Lee 2005; Lusardi 2003; Mandell 2005; Willis2008). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan skor pengetahuan keuangan siswa sekolah menengah di Amerika Serikat (Mandell 2005). Willis (2008) berpendapat bahwa biaya program pendidikan finansial lebih besar

daripada manfaatnya. Sebaliknya, penelitian lain mendukung hubungan antara pendidikan keuangan, literasi keuangan dan hasil keuangan positif (Fox, Bartholomae, dan Lee 2005; Lusardi 2003). Hasil yang beragam ini dapat menunjukkan bahwa tidak semua program pendidikan keuangan sama efektifnya, bahwa faktor-faktor selain literasi keuangan berkontribusi terhadap distress keuangan keduanya. Literatur tentang hubungan sebab dan akibat antara pendidikan finansial dan literasi keuangan sangat terbatas. Jika tujuan dari pendidikan keuangan adalah untuk meningkatkan literasi keuangan, bagaimana para pendidik keuangan tahu jika mereka telah berhasil tanpa standar literasi keuangan yang pasti. Untuk melek finansial, individu harus menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat pilihan dalam pasar keuangan yang dihadapi semua konsumen terlepas dari karakteristik khusus mereka. Ini mungkin tampak sebagai pendekatan satu ukuran untuk semua untuk pengukuran literasi keuangan, tetapi mencerminkan kenyataan bahwa semua individu membuat pilihan antara produk dan layanan keuangan standar.

Pendidikan literasi keuangan, yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan / atau kemampuan seseorang, dapat dan harus disesuaikan dengan berbagai demografi, tahapan kehidupan, dan gaya belajar yang berbeda tentu saja bukan sebagai pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua. Dengan demikian, penting untuk membedakan dengan jelas literasi keuangan dari pendidikan literasi keuangan. Ukuran literasi keuangan yang berhasil akan meningkatkan kemampuan peneliti untuk membedakan ketika kekurangan dalam literasi keuangan mungkin

bertanggung jawab atas pilihan keuangan yang mengurangi kesejahteraan dan akan memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi pendidikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konsekuensi penting lainnya dari suatu instrumen yang secara efektif mengukur literasi keuangan adalah bahwa para peneliti lebih mampu mengidentifikasi hasil apa yang paling dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan keuangan. Jika, misalnya, literasi keuangan sangat terkait dengan penggunaan produk pinjaman alternatif seperti pinjaman gaji, maka upaya pendidikan yang meningkatkan literasi di antara populasi ini dapat menyebabkan perubahan perilaku. Di sisi lain, jika literasi keuangan dalam populasi rumah tangga yang terbatas sumber daya dengan pendapatan dan pengeluaran yang tidak pasti tidak secara independen memprediksi penggunaan produk-produk ini, maka pendidikan mungkin kurang efektif daripada bentuk intervensi lainnya.

Meskipun ukuran literasi keuangan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku atau hasil keuangan, itu tidak selalu berarti bahwa individu akan berperilaku sedemikian rupa sehingga banyak sarjana, pembuat kebijakan atau pendidik akan menganggapnya optimal. Karakteristik lain seperti impulsif, bias perilaku, preferensi yang tidak biasa atau keadaan eksternal juga berkontribusi pada apa yang tampaknya menjadi pengambilan keputusan keuangan yang buruk. Ukuran literasi keuangan hanya mengidentifikasi modal manusia yang diperlukan untuk terlibat dalam perilaku keuangan yang sesuai; itu tidak memastikan ini akan terjadi. Dengan demikian, para pendidik tidak dapat berasumsi bahwa orang-orang dengan situasi keuangan yang kurang optimal tentu buta huruf secara finansial. Semakin jelas bahwa kesalahan

finansial dapat memengaruhi kesejahteraan individu serta menciptakan eksternalitas negatif yang memengaruhi semua partisipan ekonomi. Melacak variasi dan mengubah tingkat literasi keuangan menarik bagi pendidik, pembuat kebijakan, pengusaha dan peneliti. Pendekatan yang lebih standar untuk mengukur literasi keuangan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan untuk kesejahteraan finansial dan membantu dalam solusi yang memungkinkan pilihan keuangan yang efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa survey dari beberapa informan/narasumber terkait masalah peminjaman berbasis fintech system (peminjaman uang melalui aplikasi android dan teknologi) dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan dari narasumber masih awam akan proses peminjaman seperti itu, ada beberapa hambatan yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha UMKM tidak memakai atau menggunakan mode peminjaman berbasis teknologi selain karna mereka takut untuk berurusan dengan peminjaman seperti itu, mereka juga merasa belum mengetahui secara detail akan procedural dan tata cara dalam menggunakan jasa peminjaman berbasis hp android dan teknologi. Hal ini disebabkan karna beberapa hambatan diantaranya para pelaku usaha belum mendapat informasi yang jelas baik melalui media maupun sosialisasi secara massif dan langsung oleh pihak penyedia jasa peminjaman tersebut sehingga para pelaku usaha masih ragu untuk memakai jasa peminjaman berbasis teknologi, belum lagi banyak berita miring yang beredar dikalangan para pelaku usaha akan ketidak amanan yaitu pihak dari penyedia jasa peminjaman berbasis teknologi tidak mampu menjamin privasi dari para pelanggan jika meminjam uang melalui aplikasi berbasis teknologi, banyak yang beranggapan sering terjadi tindak penipuan apabila memakai jasa peminjaman berbasis teknologi

yang tergolong instant tersebut hal ini yang kemudian semakin menambah keraguan para pelaku usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga pelaku usaha yang sudah mengenal atau mendapat pengetahuan lebih terkait jasa peminjaman tersebut akan tetapi mereka tetap saja enggan untuk meminjam modal usaha karna mereka menganggap proses peminjaman seperti itu terlalu membebani dari persyaratan berupa tagihan yang harus dibayar setiap bulannya yang terkadang tidak sesuai dengan pendapatan dari para pelaku usaha itu sendiri.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan terhadap pemerintah dengan adanya peminjaman berbasis teknologi mampu menjaga keamanan layanan Fintech System terhadap pelaku UMKM di kota Makassar.
2. Diharapkan terhadap masyarakat terhusus di kota Makassar harus pintar menganalisis dan memahami dalam meminjam modal yang berbasis fintech system untuk mengembangkan usahanya.
3. Diharapkan kepada pihak jasa peminjaman modal atau uang berbasis aplikasi android atau teknologi (fintech system), dapat memberikan sosialisasi secara massif tentang system peminjaman mengenai procedural dan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin meminjam modal atau uang melalui aplikasi android atau berbasis teknologi di kota Makassar.

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu mengembangkan penelitian yang saya lakukan melihat dari aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM yang ada di kota Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Chariri. 2009. *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*.
- Annamaria Lusardi, Olivia S. Mitchell, And Vilsa Curto. 2010. Financial Literacy among the Young. *The Journal of Consumer Affairs*, Vol. 44, No. 2.
- BPS. 2018. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Sulawesi Selatan.
- BPS. 2017. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Sulawesi Selatan.
- BPS. 2018. Makassar Dalam Angka. Makassar.
- Bank Indonesia. 2017. Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial technology (PBI Tekfin). Jakarta.
- Bedjo Santoso, dan Ahmed Kameel Mydin Meera. 2017. Strategi Pembangunan Inklusi Keuangan di Indonesia. *vol 6, no 1 (Januari 2017)*.
- Dwitya Aribawa. 2015. Indeks Literasi Keuangan Generasi Indonesia.
- Fikqi Indra Adi Waluyo, dan Maria Assumpta Evi Marlina. 2019. Peran Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Media Akutansi dan Perpajakan Indonesia. Vol 1, no 1*.
- Gross, MB et.al. 2012. Use of Financial Services by The Unbanked and Underbanked and The Potential for Mobile Financial Services Adoption. *Federal Reserve Bulletin*.
- Hasan, I., De Renzis, T., dan Scheimedel, H. 2012. Retail Payments dan Economic Growth. *Bank of Finland Research Discussion Paper (19)*.
- Ivatury, G., dan Mas, I. 2008. The Early Experience With Brancless Banking. *Washington DC, CGAP*.
- Imam Wahyudi. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Dalam Kesuksesan Usaha Jasa Mikro-Kecil Di Sekitar Kampus Uin Alauddin Makassar.
- Indah Asrowati Ningrum. 2018. Analisis Faktor Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Kota Makassar.

- Kalsoom Zulfiqar, Muhammad Aslam Chaudhary And Aribah Aslam. 2016. Financial Inclusion And Its Implication For Inclusive Growth In Pakistan *Pakistan Economic and Social Review Volume 54, No. 2 (Winter 2016), pp. 297-325.*
- Khairul Anwar, dan Amri. 2017. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, vol 2, no 3 (Agustus 2017).*
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry.* California: Sage.
- M. Mostak Ahamed¹ and Sushanta Mallick. 2015. Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. *JEL Classification: G21; G28; O16*
Keywords: Financial inclusion; Bank stability; Bank competition; Institutional quality; Economic growth.
- Mandira Sarma dan Jasim Pais. 2008. Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. *Indian Council for Research on International Economic Relations, Core 6A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110003, India Ph: +91 11 24 64 52 18.*
- Matthew. 2015. World Economic Forum. Jakarta
- Monique Cohen And Candace Nelson. 2011. Financial Literacy: A Step for Clients towards Financial Inclusion. *Global Microcredit Summit Commissioned Workshop Paper November 14-17, 2011 – Valladolid, Spain.*
- Mas, I. 2009. The Economics and The Branchless Banking. Innovations.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New. Methods.* California; SAGE publications.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- M, Rahardjo. 2011. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.*
- Tjipto, Subadi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Surakarta : Muhammadiyah University Press 2006.

- Minakshi Ramji. 2009. Financial Inclusion Gulbarga: Finding Usage in Access. *Institute for Financial Management and Research Centre for Micro Finance*.
- Nur Eka Setiawati. 2017. Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT AL-Falah Terhadap Transaksi Rentenir. *Al-Anwar*, vol 9. no 1 (tahun 2017).
- Novita Anjarsari. 2010. Perspektif Keuangan Islam Menghadap Krisis Keuangan Global Tinjauan Konseptual. Universitas Negeri Surabaya.
- Onaolapo A. R. Ph.D. 2015. Effects Of Financial Inclusion On The Economic Growth Of Nigeria (1982-2012). Vol.3, No.8 pp.11-28, September 2015. *International Journal of Business and Management Review. Published by European Centre for Research Training and Development UK*.
- Prastowo. 2018. Analisis Regional Keuangan Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol.4, no 1 (januari 2018).
- Rika Destiyanti. 2016. Literasi Inklusi Keuangan serta Indeks Utilitas UMKM di Padang. *Jurnal bisnis dan Manajemen*, vol, 2, no 2 (Desember 2016).
- Sylviana Maya Damayanti, Isrochmani Murtaqi, dan Harry Anugerah Pradana. Pentingnya Literasi Keuangan Dalam Era Ekonomi Global. vol 9, no 3 (April 2018).
- Susu Susanti. 2017. Optimalisasi Strategi Green Product Terhadap Perkembangan UMKM Lampung di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam. (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung).
- Satya R. Chakravartya and Rupayan Pal. 2010. Measuring Financial Inclusion: An Axiomatic Approach. *Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai March 2010*.
- Sandra Carolina Férez Blando And Fernando Alonso Guinea. 2013. Linking Financial Inclusion and Development. *Universidad Complutense Madrid*.
- Sandra J. Huston. 2010. Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, Vol. 44, No. 2, 2010.
- Titiharuw, I.S., dan Atje, R. 2009. Payment Sistem in Indonesia: Recent Developments and Policy Issues. ADBI Working Paper Series (149).

Tri Andina Rahayu. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera. *Vol 7 nor 1, Juni 2016*.

Yusuf, A.Muri. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.



LAMPIRAN













UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Erwin Saputra lahir di Sabbala 5 Agustus 1996 anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Mahmud dan Ibunda Muliati. Penulis memulai pendidikan di SDI Pa'bundukang dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bontonompo Selatan dan lulus pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bontonompo Selatan dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dan pada akhirnya penulis menyelesaikan pendidikan sarjana satu (1) di Jurusan Ilmu Ekonomi pada tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R